

LITERASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGUATAN RESILIENSI MASYARAKAT PASCA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

(Analisis Komunikasi Kebijakan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten
Sukoharjo)

Fitria Dewi Kirana, Rutiana Dwi Wahyunengseh

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: fitriakirana98@student.uns.ac.id

Abstrak

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana Desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun. . Dalam konteks masyarakat desa yang belum terbiasa dengan platform media sosial dan pertemuan *online*, tentu mengalami tantangan khusus untuk strategi komunikasi publik terkait isu COVID-19 di masa COVID-19. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menilai bahwasannya masih ada celah antara literasi, partisipasi masyarakat dan juga komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di level desa. Tujuan dari penelitian ini menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi respon partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 berdasar literasi informasi yang dimiliki. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara, observasi, kuisioner semi terbuka, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini diperoleh bahwasannya komunikasi kebijakan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Strategi komunikasi kebijakan yang baik dan tepat menciptakan pemahaman yang mendalam oleh masyarakat dan hal tersebut mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi kebijakan yang dihadapi oleh Pemerintah desa yakni sikap pelaksana kebijakan yang kurang kooperatif dan tidak transparan dalam penentuan calon penerima BLT Dana Desa dan program PKTD dan juga komunikasi yang kurang baik antarperangkat desa dalam ketidaksielarasan pemberian informasi yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kata Kunci: COVID-19, BLT Dana Desa, komunikasi kebijakan, partisipasi publik, resiliensi

Abstract

As an effort to address the impact of COVID-19, especially in rural areas, the government has established the use of Village Funds as part of the social safety net. Village funds are reallocated as Direct Cash Assistance (BLT) from village funds intended for poor residents who have lost their livelihoods due to the COVID-19 pandemic and have not yet received any assistance. In the context of rural communities that are not yet accustomed to social media platforms and online meetings, there are certainly specific challenges for public communication strategies related to COVID-19 during the pandemic. Starting from this issue, the researcher assesses that there is still a gap between literacy, community participation, and the policy communication

carried out by the government, especially at the village level. The purpose of this study is to conclude the things that influence the response of community participation to the policy of Strengthening Community Resilience after the COVID-19 Pandemic based on their information literacy. The type of research is descriptive qualitative research, with interviews, observations, semi-open questionnaires, and documentation as data collection methods. The research informants were village officials, community leaders, and the general public. The data analysis technique used Miles and Hubberman's interactive analysis. The results of this study found that policy communication is very influential on the success of a policy. A good and appropriate policy communication strategy creates a deep understanding by the community and this encourages the community to participate in a policy process. There are several obstacles in policy communication faced by the village government, namely the attitude of policy implementers who are less cooperative and not transparent in determining prospective recipients of the BLT Dana Desa and PKTD programs and also poor communication between village officials in providing information that can cause confusion in the community.

Keywords: COVID-19, BLT Dana Desa, policy communication, public participation, resilience

Pendahuluan

Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) merupakan wabah global koronavirus atau penyakit menular yang disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2).

Kasus virus corona baru (nCoV) pertama kali terdeteksi di Tiongkok pada Desember 2019, dan virus tersebut menyebar dengan cepat ke negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan *World Health Organization* (WHO) mengumumkan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia pada 30 Januari 2020 dan menetapkan wabah tersebut sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

Penyebarannya telah meningkat dari waktu ke waktu, menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan kerugian material. Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan jumlah kasus COVID-19 tertinggi pada 16 Februari 2022, dengan 64.718 kasus terkonfirmasi positif, 167 kematian, dan 25.386 sembuh (Kemenkes, 2023).

Pandemi COVID-19 dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Salah satu konsekuensi dari pandemi COVID-19 adalah kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4 persen atau bahkan lebih rendah. Ini tergantung pada seberapa lama dan seberapa parah pandemi mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan ekonomi.

Selain perlambatan ekonomi, depresiasi rupiah, penurunan indeks harga saham pasar modal, dan masalah likuiditas, hal ini juga mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Pandemi COVID-19 tampaknya dapat memengaruhi bisnis besar maupun kecil secara mikro. Karena modal dan sumber daya mereka yang lebih kecil, organisasi kecil pasti akan mengalami kesulitan untuk membiayai operasionalnya. Organisasi besar juga dapat mengalami dampak pandemi karena biaya tetap yang besar yang harus dikeluarkan sementara arus pendapatan pasti akan menurun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) huruf c tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Program Atau Kegiatan Percepatan Pencapaian SDG's Desa Melalui Adaptasi Kebiasaan Baru (SDG's Desa 1) yakni Desa Tanpa Kemiskinan

SDG Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan menargetkan agar tidak ada orang miskin di desa pada tahun 2030. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin, memastikan akses ke layanan dasar, dan melindungi masyarakat dari bencana alam adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Hasipramudilla (2020) mengatakan bahwa pemerintah membuat Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial untuk menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan. Dana Desa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian mereka karena pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan apa pun sebelumnya.

Sistem ekonomi dan kesehatan serta tingkat literasi masyarakat adalah faktor penting dalam penanganan COVID-19. Literasi tidak hanya berarti orang yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Literasi juga berarti kemampuan untuk memahami, mencerna, dan menganalisis teks dan ide-ide, dan kemudian menerapkannya untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan. WHO dalam *Health Literacy The Solid Fact* (2013) menemukan bahwa literasi yang rendah berpotensi meningkatkan perilaku berisiko dan memperburuk kesehatan, hingga berdampak pembengkakan anggaran kesehatan. Di era digital, tantangan literasi masyarakat lebih besar, karena arus informasi sangat tidak terkontrol.

Literasi informasi terkait COVID-19 juga berdampak pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam COVID-19 bermakna dalam dimensi: (i) mentaati kebijakan vaksinasi COVID-19 sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19 yang dapat memperberat beban pelayanan kesehatan publik; (ii) menaati amanat undang – undang terkait pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19 (iii) membantu pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19, misal: memperluas edukasi publik terkait COVID-19, membagi masker, membagi hand sanitizer, membagi sembako, memberi fasilitasi peluang usaha untuk yang terkena PHK, dan sejenisnya. (Alizar & Usman, 2020)

Jika dilihat dari segi literasi masyarakat, angka melek huruf di Kabupaten Sukoharjo mencapai 94,09 persen dari seluruh jumlah penduduknya (BPS, 2020). Jadi dari angka tersebut dapat dilihat bahwasannya hampir seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat membaca, menulis, dan berhitung (literasi dalam artian sempit). Tapi dengan angka sebesar itu, tidak semua masyarakat Sukoharjo mampu mengelola dan

memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah baik melalui media massa ataupun secara langsung.

Komunikasi publik tidak terbatas pada komunikasi media sosial. Apalagi di desa, komunikasi pemerintah desa masih didominasi komunikasi *offline*. Pada masa pandemi, dengan kebijakan *physical distancing*, jaringan komunikasi mengandalkan *Whatsapp* grup. Dalam konteks masyarakat desa yang belum terbiasa dengan platform media sosial dan pertemuan *online*, tentu mengalami tantangan khusus untuk strategi komunikasi publik terkait isu COVID-19 di masa COVID-19.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menilai bahwasannya masih ada celah antara literasi, partisipasi masyarakat dan juga komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di level desa. Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait (1) Bagaimana strategi komunikasi Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah desa?; (2) Bagaimana tingkat literasi informasi masyarakat desa terkait Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19?; (3) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19?.

Komunikasi Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah instrumen pemerintah, bukan hanya dalam arti pemerintahan yang hanya berkaitan dengan aparatur negara, tetapi juga dalam arti pemerintahan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu rakyat, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan adalah hasil dari sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk sistem politik negara (Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dan Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino, 2006:6,7).

Dalam kebijakan publik, komunikasi memainkan peran penting dalam semua aspek pengembangan dan penggunaan kebijakan publik (Zhang, 2017). Sebagai penghubung antara pemerintah dan warganya, dalam penerapan atau implementasi suatu kebijakan, komunikasi yang baik akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Strategi komunikasi yang efektif merupakan prasyarat penting untuk mengeksplorasi kebijakan publik sebagai memotivasi, membujuk, dan berbagi informasi adalah fungsi dasar dari strategi komunikasi (Bender, 2014).

Dalam era e-governance, pemerintah diminta untuk menggunakan platform media baru, seperti situs web internet, atau bahkan blog, dan akun media sosial, untuk mendorong partisipasi warga negara. Komunikasi dua arah ini sangat penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat. Semakin baik pemahaman antara

pemerintah dan masyarakat, semakin baik kebijakan publik. Semakin dekat komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, semakin mudah adopsi kebijakan. Semakin lancar komunikasi publik, semakin besar peluang partisipasi publik (Hong, 1989).

Strategi Komunikasi Kebijakan Publik

Rogers dalam Cangara (2018) membatasi definisi strategi komunikasi sebagai rencana (*planning*) yang digunakan untuk mengatur atau mengubah tingkah laku manusia secara besar-besaran dengan menggunakan transfer ide-ide baru. Selain itu, strategi komunikasi juga didefinisikan sebagai kombinasi terbaik dari semua komponen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), dan penerima, serta dampak (efek).

Sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah membutuhkan strategi komunikasi untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. (Rodiah & Yusup, 2018, p. 4). Harold Lasswell menjelaskan bahwa untuk memahami proses komunikasi massa perlu mempelajari setiap tahapan modelnya, yaitu Who, Says what, In which channel, To Whom, dan With what effect. (Fiske, 2007, p. 46). Apabila dijabarkan sebagai berikut, (1) *Who* (Siapa komunikatornya?); (2) *Says what* (Pesan apa yang dinyatakannya?); (3) *In which channel* (Media apa yang digunakannya?); (4) *To Whom* (Siapa targetnnya?); (5) *With what effect* (Dampak apa yang diharapkan)?. (Hasan, 2005).

Literasi Publik

Menurut Mills (dalam Yunus Abidin, 2015) literasi berarti keberaksaraan. Literasi telah berkembang dari pengertian yang lebih sempit ke pengertian yang lebih luas. Ini mencakup hal-hal seperti menjadi mahir dalam teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, mencerna, dan menganalisis teks dan ide-ide sehingga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan.

WHO dalam *Health Literacy The Solid Fact* (2013) menemukan bahwa literasi yang rendah berpotensi meningkatkan perilaku berisiko dan memperburuk kesehatan, hingga berdampak pembengkakan anggaran kesehatan. Di era digital, tantangan literasi masyarakat lebih besar, karena arus informasi sangat tidak terkontrol. Di era pandemi COVID-19 literasi masyarakat yang baik akan mampu: (i) menangkal hoax dan dampak infodemik (kesemrawutan informasi) COVID-19; (ii) meningkatkan perilaku yang benar dan patuh pada protokol COVID-19; (iii) meningkatkan partisipasi untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku atau dukungan masyarakat kepada kebijakan pemerintah. Partisipasi merupakan *out come* yang diharapkan dari komunikasi kebijakan publik.

Merujuk pada pendapat Canter (dalam Arimbi, 1993), partisipasi didefinisikan sebagai proses dua arah yang terjadi secara terus menerus, dari sini dapat diartikan bahwasannya partisipasi publik merupakan wujud dari interaksi atau komunikasi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga masyarakat selaku pihak yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat mampu merespon positif dengan memberikan dukungan maupun member masukan terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga masyarakat juga berhak menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Salah satu definisi partisipasi publik adalah sebagai berikut: (1) keinginan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1997:35); dan (2) keterlibatan secara sadar seseorang dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, yang berkontribusi pada tanggung jawab bersama (Wazir, et al., 1999: 29).

Partisipasi masyarakat dalam COVID-19 bermakna dalam dimensi: (i) mentaati protokol kesehatan sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19 yang dapat memperberat beban pelayanan kesehatan publik; (ii) membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, misal: memperluas edukasi publik terkait COVID-19, membagi masker, membagi hand sanitizer, membagi sembako, memberi fasilitasi peluang usaha untuk yang terkena PHK, dan sejenisnya. (Alizar & Usman, 2020)

Resiliensi Bencana

Kemampuan seseorang untuk mempertahankan fungsi mental yang agak stabil dalam berbagai kondisi disebut resiliensi. Istilah Latin "*resilio*", yang berarti "*bounce back*" atau melambung kembali, adalah asal-usulnya. Individu, kelompok, organisasi, dan komunitas adalah beberapa level analisis di mana penelitian tentang resiliensi berkonsentrasi. Ini mencakup banyak bidang, seperti psikologi, ekologi, manajemen, organisasi, dan manajemen keselamatan.

Grosberg (1994) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kualitas resiliensi yang berbeda. Kualitas-kualitas ini dipengaruhi oleh usia, taraf perkembangan, tingkat intensitas ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dan tingkat dukungan sosial yang membentuk resiliensi. Ada tiga komponen yang membentuk resiliensi, yaitu: 1) Dukungan Sosial (*I Have*) adalah dukungan yang berasal dari lingkungan di sekitar individu 2) Kekuatan Pribadi (*I Am*) adalah kekuatan pribadi seseorang yang terdiri dari perasaan, tingkah laku, dan keyakinan dirinya sendiri, dan 3) Kemampuan

untuk Melakukan (*I Can*) adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan sosial dan interpersonal.

Semua upaya untuk membangun ketahanan harus mempertimbangkan faktor sosial, seperti mengelola dan mengurangi resiko dengan menggunakan pengetahuan dan jaringan lokal. Komponen-komponen ini sangat penting untuk respons sistem dan pemulihan setelah bencana alam. Dibandingkan dengan orang yang lemah, miskin, dan tidak berpendidikan, populasi yang cepat tanggap dan sadar keuangan akan bereaksi lebih baik dalam situasi krisis. Usia, pekerjaan, pendidikan, etnis, situasi, ekonomi, struktur keluarga, migrasi, dan akses ke informasi adalah beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan perkotaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara nyata keadaan yang terjadi di lapangan. Penulis ingin mendeskripsikan dan juga menggambarkan apa saja isi informasi kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh aparatur desa, apa saja jenis media komunikasi yang digunakan pemerintah desa untuk mensosialisasikan kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19, sumber informasi dan komunikasi yang membuat masyarakat desa memiliki literasi tentang kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19, dan juga respon masyarakat yang tahu tentang kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, lebih tepatnya di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Batasan konsep dan operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut (1) Komunikasi Kebijakan adalah segala bentuk penyampaian informasi dan peraturan terkait penguatan resiliensi pasca COVID-19 di desa lokasi penelitian, yaitu Desa Palur, Kecamatan Mojolaban; (2) Literasi adalah kemampuan berkomunikasi dan mencari informasi atau meleak teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar terkait COVID-19 dan dampaknya; (3) Partisipasi masyarakat adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan program penguatan resiliensi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan membantu kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19; (4) Konten Informasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pandemi COVID-19: adalah informasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Studi ini menggunakan uji validasi yang menggunakan triangulasi

teknik. membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, termasuk keyakinan, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif oleh Miles dan Hubberman.

Hasil dan Pembahasan

Desa Palur terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Secara Geografis, Desa Palur berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain: batas utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta, atas barat berbatasan dengan Desa Triyagan dan Desa Joho, batas Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Desa Demakan dan Desa Dukuh, batas timur berbatasan dengan Desa Plumbon dan Desa Gadingan

Desa Palur merupakan desa dengan wilayah paling besar di Kecamatan Mojolaban yakni 409 Ha atau setara 11,51 % dari luar keseluruhan wilayah Kecamatan Mojolaban, dengan jarak tempuh menuju ibukota kabupaten sejauh 16 kilometer. Menurut Data BPS Tahun 2021, Desa Palur memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.855 jiwa, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 7.572 jiwa dan perempuan sebanyak 7.283 jiwa. Dengan jumlah kepadatan penduduk berkisar 4.389/km². Berdasarkan jumlah tersebut, tentunya masing-masing penduduk memiliki keadaan yang berbeda-beda baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun kepercayaan.

Berdasarkan Data BPS Tahun 2020, mayoritas penduduknya sudah dalam kategori keluarga sejahtera tahap I dengan persentase 55,2% atau sebanyak 2392 keluarga, pada kategori keluarga sejahtera tahap II, III, dan tahap III plus dengan persentase 38,1% atau sebanyak 1.652 keluarga, dan terakhir pada kategori keluarga pra sejahtera dengan persentase 6,8% atau sebanyak 292 keluarga.

Penanganan pandemi COVID-19 menjadi hal yang sangat krusial belakangan ini, muai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat berupaya untuk mengurangi persebaran virus tersebut dan juga berbagai upaya juga dilakukan untuk pemulihan ekonomi yang sangat terganggu akibat adanya pandemi tersebut.

Strategi Komunikasi Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19

BLT Dana Desa COVID-19

Komunikasi menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, strategi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan karena literasi informasi dan partisipasi masyarakat merupakan cerminan hasil dari strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah.

Informasi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa COVID-19 yang diberikan tidak sepenuhnya tertuju pada masyarakat umum, melainkan terstruktur

melalui badan atau aparatur desa dan juga melalui RT dan RW. Dalam hal ini pemerintah desa akan melakukan berbagai pertimbangan dalam menentukan calon penerima BLT sesuai dengan kriteria yang ada, yakni calon penerima harus merupakan warga Desa Palur yang belum menerima bantuan dalam bentuk apapun baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penentuan calon penerima yang berhak atas BLT Dana Desa COVID-19 ini, pemerintah desa melalui Kepala Desa dan juga aparatur desa yang lain termasuk Satgas Desa, LSM, BPD, RW dan juga RT, bersama menghimpun data dan juga menyeleksi data calon penerima BLT Dana Desa COVID-19.

Kepala Desa memberikan mandat kepada Kepala Dusun yang mana selanjutnya akan langsung ditugaskan kepada RT dan RW setempat untuk mendata warga yang masuk dalam kriteria calon penerima BLT Dana Desa COVID-19. Kemudian data yang diterima oleh pemerintah desa kemudian akan di survey untuk memastikan kebenaran dari keadaan nyata warga tersebut.

Setelah data calon penerima telah terhimpun kemudian diadakan konsolidasi atau musyawarah untuk menentukan penerima dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19 tersebut. Kemudian pemerintah desa akan melakukan validasi dan pengesahan melalui bantuan dari beberapa perwakilan masyarakat dan tokoh penting dalam masyarakat untuk ikut memverifikasi kebenaran dan kelayakan dari calon penerima bantuan yang telah dimusyawarahkan tersebut.

Kemudian jika terdapat warga yang kurang berkenan atau keberatan dalam putusan pemerintah desa terkait penentuan penerima bantuan tersebut, pemerintah desa bersama BPD akan memfasilitasi adanya musyawarah guna menyelesaikan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh penanggungjawab Siaga COVID-19 Desa Palur dalam wawancara.

Dalam implementasi penyaluran BLT Dana Desa COVID-19 di Desa Palur juga dijelaskan kepada penerima bantuan terkait dengan besaran bantuan dari BLT Dana Desa COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 300.000,00 yang akan diberikan dalam dua belas tahap dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian akan diadakan pendataan ulang untuk penerima BLT Dana Desa COVID-19 pada tahun anggaran 2021 yang mana besaran bantuan yang diterima adalah Rp 300.000,00 yang akan diberikan dalam dua belas tahap dalam kurun waktu satu tahun. Di Desa Palur sendiri sudah berjalan beberapa tahap yakni tahap I dan XII tahun 2020 dan juga tahap I – XII tahun 2021. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Palur dalam wawancara.

Dari uraian tersebut dapat hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam pengkomunikasian terkait kebijakan BLT Dana Desa untuk COVID-19 sudah berjalan terstruktur dan baik, pemerintah desa juga memfasilitasi bagi warga yang kurang berkenan atau mengajukan keberatan terkait dengan hasil dari penetapan penerima bantuan dapat disampaikan kepada pemerintah desa yang mana akan ditindaklanjuti dengan musyawarah bersama dengan BPD.

Pemerintah Desa Palur juga secara terbuka menyampaikan besaran bantuan yang akan diterima dan juga penyaluran akan berlangsung dalam beberapa tahap tersebut.

Literasi Informasi Masyarakat Terkait Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19

Di Desa Palur masyarakat mengetahui adanya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka mengetahui ketika bantuan tersebut telah tersalurkan, semisal dari pembicaraan dengan orang lain atau istilah jawanya *getok tular*. Karena pada dasarnya komunikasi di desa masih sangat didominasi oleh komunikasi secara langsung. Begitu pula di Desa Palur. Sehingga penyampaian informasi sebatas penyampaian secara terstruktur dari aparatur desa ke Kepala Dusun, RW dan RT, baru kemudian disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat memengaruhi tingkat literasi atau tingkat pemahaman dari masyarakat itu sendiri.

Desa Palur merupakan desa di wilayah Kecamatan Mojolaban yang bisa digolongkan ke dalam desa paling maju dalam hal pendidikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sekolah yang ada di Desa Palur, antara lain 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Sekolah Dasar Swasta, 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta. Hal tersebut dapat mendorong tingkat literasi masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Dalam konteks bernegara, dengan literasi yang baik diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengkritisi setiap kebijakan yang berlaku di pemerintahan khususnya di Desa Palur. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik pula.

Dalam implementasi kebijakan Pemerintah Desa Palur tentang BLT Dana Desa COVID-19, literasi tidak hanya sebatas masyarakat mengetahui bahwasannya pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori tidak mampu. Tetapi pemerintah Desa Palur juga memastikan bahwasannya masyarakat mengetahui dengan pasti apa bantuan yang tengah disalurkan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat paham dengan maksud dan tujuan dari adanya BLT Dana Desa COVID-19. Sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat fungsi dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan kebijakan, sehingga masyarakat tidak merasa bahwasannya penyaluran bantuan tidak adil dan tepat sasaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan BPD Desa Palur dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Penerima BLT Dana Desa COVID-19 juga diberikan informasi rinci terkait dengan besaran uang yang akan diterima dan disalurkan dalam beberapa tahap, yakni BLT DANA DESA COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 600.000,00 yang akan diberikan dalam dua tahap dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian akan diadakan pendataan ulang untuk penerima BLT Dana Desa COVID-19 pada tahun anggaran 2021 yang mana besaran bantuan yang diterima adalah Rp 300.000,00 yang akan diberikan

dalam empat tahap dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Hal ini selaras dengan yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Palur dan didukung oleh beberapa narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwasannya komunikasi yang baik dari pemerintah juga berdampak pada literasi dan juga informasi di masyarakat. Hal ini juga mengurangi adanya banyak pertanyaan di masyarakat tentang BLT Dana Desa COVID-19 dan bahkan dalam tingkatan pemahaman yang lebih mendalam masyarakat juga dapat ikut mengawal proses pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan Dana Desa di Desa Palur.

Partisipasi Masyarakat Mendukung Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19

Upaya penguatan resiliensi masyarakat di bidang ekonomi melalui BLT Dana Desa COVID-19 di Desa Palur, juga tak lepas dari partisipasi masyarakatnya. Masyarakat Desa Palur selalu berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Partisipasi dalam hal ini tidak hanya sebatas dengan mendukung ataupun memberi *feedback* yang baik terhadap pemerintah, tetapi juga berupa kritikan bahkan penolakan dari masyarakat yang mana diharapkan dapan membangun desa menjadi lebih baik lagi.

Partisipasi masyarakat terkait BLT Dana Desa COVID-19 ini juga tidak hanya sebatas partisipasi oleh masyarakat yang menerima manfaat dari adanya bantuan tersebut, melainkan masyarakat umum juga berpartisipasi dalam keberjalanannya. Mulai dari pada saat penentuan calon penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria hingga konsolidasi bagi warga yang kurang berkenan dengan hasil dari penyaringan data penerima yang sudah diputuskan oleh pemerintah Desa Palur. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua RT 02 RW XVIII dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Analisis

Berbagai kebijakan dan program telah diciptakan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran maupun mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19. Berbagai upaya dan strategi baik komunikasi maupun implementasian kabijakan juga telah dilakukan agar masyarakat mau dengan sadar dan aktif bersama pemerintah membantu penanganan pandemic COVID-19.

Prioritas Dana Desa yang dimaksud dalam implementasi program BLT Dana Desa COVID-19 ini dimaksudkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga upaya penanggulangan kemiskinan akibat dari pandemi COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) huruf c

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Program atau Kegiatan Percepatan Pencapaian SDG's Desa Melalui Adaptasi Kebiasaan Baru pada SDG's 1 tentang Desa Tanpa Kemiskinan.

Strategi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan karena literasi informasi dan partisipasi masyarakat merupakan cerminan hasil dari strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga perlu adanya strategi yang tepat dalam mengedukasi masyarakat melalui informasi - informasi yang diberikan untuk membentuk literasi masyarakat. Dengan adanya komunikasi dan informasi dari pemerintah desa terkait COVID-19, diharapkan seluruh masyarakat desa memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan tersebut dan juga terkait pandemi COVID-19. Hal tersebut akan menumbuhkan respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut dan juga berpartisipasi dalam mencegah penyebaran maupun mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Pada komunikasi kebijakan – kebijakan dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat di Desa Palur, komunikasi terjalin secara terstruktur dari Kepala Desa kepada perangkat desa mulai dari Koordinator Bindang hingga Ketua RT yang kemudian akan ditindaklanjuti atau disampaikan oleh Ketua RW dan Ketua RT kepada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan sendiri oleh Pemerintah Desa Palur untuk menyelaraskan dan memastikan seluruh perangkat desa paham dengan isi dan maksud dari kebijakan yang hendak disampaikan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian ataupun berita bohong dan kebingungan di masyarakat

Dalam komunikasi kebijakan – kebijakan penguatan resiliensi masyarakat di Desa Palur, masih terdapat berbagai hambatan yang menjadikan komunikasi yang tercipta kurang efektif, padahal komunikasi efektif sangat penting untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, serta mempertahankan persepsi risiko masyarakat. Hal ini juga sangat berdampak pada respon masyarakat terhadap kebijakan.

Terdapat sejumlah isu terkait komunikasi kebijakan dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat melalui BLT Dana Desa COVID-19 pada masa pandemi, yakni,

1. Sikap Pelaksana Kebijakan

Suatu kebijakan akan berhasil juga karena adanya dukungan dari sikap para pelaksana kebijakan tersebut. Sikap dari pelaksana yang bertanggung jawab dan kooperatif dalam pelaksanaan program dapat menjadikan program berjalan dengan efektif dan juga sesuai dengan hasil yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut.

Pada komunikasi kebijakan BLT Dana Desa COVID-19 dan Program PKTD di Desa Palur masih menunjukkan adanya kurang transparansinya dalam proses kebijakan dari aparat desa. Hal ini berdasarkan pada pendapat dan informasi dari beberapa warga yang mana menyatakan bahwasannya dalam proses penentuan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa COVID-19 masih belum terbuka kepada masyarakat, dan masih ada yang merdasar pada unsur kekerabatan, sehingga tidak sesuai dengan target kebijakan yang sudah diamanatkan oleh kebijakan.

2. Komunikasi Antarpelaksana Kebijakan

Komunikasi antarpelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dari hasil temuan penelitian yang dilakukan di Desa Palur masih menunjukkan kurangnya komunikasi antarpelaksana kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa hal yakni (1) ketidakselarasan pesan antaraktor pemerintah; (2) pesan yang berpotensi menyebabkan kebingungan karena perbedaan pemahaman dari masing – masing pelaksana kebijakan.

Dalam pelaksanaannya program BLT Dana Desa COVID-19 dan PKTD masih menunjukkan banyaknya perbedaan pemahaman antar warga dan sehingga warga masih bingung terkait dengan proses dari kebijakan tersebut. Hal dapat dibuktikan berdasar pada hasil dari temuan penelitian yang mana dinyatakan oleh para ketua RT bahwasannya dalam musyawarah penentuan calon penerima bantuan hanya sebatas formalitas, karena pada pelaksanaannya calon penerima bantuan akan langsung ditentukan oleh aparatur desa tanpa adanya verifikasi data lebih lanjut. Sehingga pada saat ada pertanyaan dari masyarakat terkait penentuan calon penerima bantuan tersebut, RT langsung menyarankan kepada warga untuk bertanya kepada pihak aparat desa.

Dalam implementasi kebijakan Pemenrintah Desa Palur tentang BLT Dana Desa COVID-19, literasi tidak hanya sebatas masyarakat mengetahui bahwasannya pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori tidak mampu. Tetapi pemerintah Desa Palur juga memastikan bahwasannya masyarakat mengetahui dengan pasti apa bantuan yang tengah disalurkan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat paham dengan maksud dan tujuan dari adanya BLT Dana Desa COVID-19. Sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat fungsi dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan kebijakan, sehingga masyarakat tidak merasa bahwasannya penyaluran bantuan tidak adil dan tepat sasaran.

Penerima BLT Dana Desa COVID-19 juga mengetahui dengan pasti terkait informasi rinci terkait dengan besaran uang yang akan diterima dan disalurkan dalam beberapa tahap, yakni BLT DANA DESA COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 600.000,00 yang akan diberikan dalam dua tahap dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian akan diadakan pendataan ulang untuk penerima BLT Dana Desa COVID-19 pada tahun anggaran 2021 yang mana besaran bantuan yang diterima adalah Rp 300.000,00 yang akan diberikan dalam empat tahap dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi yang baik dari pemerintah juga berdampak pada literasi dan juga informasi di masyarakat. Hal ini juga mengurangi adanya banyak pertanyaan di masyarakat tentang BLT Dana Desa COVID-19 dan bahkan dalam tingkatan pemahaman yang lebih mendalam masyarakat juga dapat ikut mengawal proses pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan Dana Desa di Desa Palur.

Dalam komunikasi kebijakan penguatan resiliensi masyarakat dalam konteks penelitian adalah kebijakan BLT Dana Desa COVID-19 dan PKTD di Desa Palur, menunjukkan bahwasannya terjalannya komunikasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Palur dengan masyarakat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan tersebut, baik itu dalam implementasi maupun evaluasi kebijakan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang mana terdapat beberapa warga yang mempertanyakan terkait dengan bantuan dan skema penentuan calon penerima bantuan tersebut, sehingga hal ini menjadi bahan untuk perbaikan informasi yang hendak disampaikan dan juga menjadi evaluasi untuk pelaksanaan komunikasi kebijakan yang lebih baik lagi sehingga informasi dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Dan untuk menindak lanjuti hal tersebut, beberapa Ketua RT melakukan pengkomunikasian secara lebih mendalam dan mendetail terkait informasi bantuan dan juga skema penentuan calon penerima bantuan, bahkan ada Ketua RT yang juga mengajak tokoh – tokoh masyarakat juga untuk membantu dalam hal penentuan calon penerima bantuan. Sehingga hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang timbul karena adanya pengkomunikasian kebijakan tersebut.

Penutup

Hasil dari penelitian terkait literasi dan partisipasi masyarakat mendukung kebijakan penguatan resiliensi masyarakat pasca pandemi COVID-19 menemukan bahwasannya komunikasi menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, strategi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan karena literasi informasi dan partisipasi masyarakat merupakan cerminan hasil dari strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah.

Komunikasi kebijakan yang terjalin di Desa Palur masih sebatas komunikasi struktural dari pemerintah ke masyarakat dan juga masih terfokus pada komunikasi langsung (*offline*). Desa Palur belum memiliki *platform* sosial media maupun *website* resmi pemerintahan desa. Hal ini menjadikan sulitnya masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan kebijakan penguatan BLT Dana Desa COVID-19 dan PKTD dan juga komunikasi dua arah yang tercipta belum maksimal

Dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat di bidang ekonomi, Pemerintah Desa Palur melalui BLT Dana Desa COVID-19 dan program PKTD, literasi tidak hanya sebatas masyarakat mengetahui bahwasannya pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori tidak mampu. Tetapi pemerintah Desa Palur juga memastikan bahwasannya masyarakat mengetahui dengan pasti apa bantuan yang tengah disalurkan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat paham dengan maksud dan tujuan dari adanya BLT Dana Desa COVID-19 dan program PKTD. Sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat fungsi.

Komunikasi yang baik dari pemerintah juga berdampak pada literasi dan juga informasi di masyarakat. Hal ini juga mengurangi adanya banyak pertanyaan di

masyarakat tentang BLT Dana Desa COVID-19 dan bahkan dalam tingkatan pemahaman yang lebih mendalam masyarakat juga dapat ikut mengawal proses pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan Dana Desa di Desa Palur.

Partisipasi masyarakat terkait BLT Dana Desa COVID-19 ini juga tidak hanya sebatas partisipasi oleh masyarakat yang menerima manfaat dari adanya bantuan tersebut, melainkan masyarakat umum juga berpartisipasi dalam keberjalanannya. Mulai dari pada saat penentuan calon penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria hingga konsolidasi bagi warga yang kurang berkenan dengan hasil dari penyaringan data penerima yang sudah diputuskan oleh pemerintah Desa Palur.

Dalam komunikasi kebijakan penguatan resiliensi masyarakat dalam konteks penelitian adalah kebijakan BLT Dana Desa COVID-19 di Desa Palur, menunjukkan bahwasannya terjalannya komunikasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Palur dengan masyarakat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan tersebut, baik itu dalam implementasi maupun evaluasi kebijakan tersebut.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan analisis komunikasi kebijakan, peneliti menemui beberapa permasalahan yang mana dapat diatasi dan diperbaiki agar dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dan juga dapat terciptanya pemerintahan yang melibatkan masyarakat di dalamnya, sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa Palur, perlu adanya pengaktifan media informasi baru seperti *platform* media sosial dan *website* resmi desa agar terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi desa dan juga meminimalisir adanya berita bohong atau salah informasi.
2. Bagi Pemerintah Desa Palur, perlu adanya peningkatan komunikasi antarperangkat desa dan seluruh aparatur desa, agar terciptanya keselarasan pemahaman dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat Desa Palur, diharapkan lebih berperan aktif dalam mencari informasi dan berpartisipasi terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu pemerintah desa maupun pemerintah pusat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, karena keterbatasan dari peneliti dalam menjawab rumusan masalah terkait strategi komunikasi, literasi dan partisipasi, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dan membuktikan validitas lebih dalam terkait dengan penelitian tersebut.

Referensi

Abdullah, Syukri. 2020. Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19. <https://dialeksis.com/analisis/dana-desa-untuk-penanganan-COVID-19/>

- Alizar, A. M dan Yusdi, U. (2020). *Partisipasi Publik Dalam Penanganan Covid - 19*. <https://iap2.or.id/COVID-19/>
- Cangara, H. (2018). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaplin, J. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi (Penerjemah Kartini Kartono)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hong, SM dan Ostini, R. (1989) Evaluasi Lebih Lanjut dari Skala Reaksi Psikologis Merz. *Ulasan Psikologis*, 64, 707-710.
- Jateng (2020). *Jateng Tnggap COVID-19*. <https://corona.jatengprov.go.id/>
- Kang, I., Lee, G., Park, C. dan Shin, M. (2013) Menyesuaikan dan Menargetkan Strategi Komunikasi untuk Mendorong Adopsi Sukarela dari Polri Publik Non-Preferred. *Peramalan Teknologi & Perubahan Sosial*, 80, 24-37. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.08.001>
- Lestari, P., et. Al. (2016). Komunikasi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 56-64
- Moris. P dan Thoriq. R. (2019). Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 112-126
- Quy, H. and Thai, T.H. (2018). An Empirical Assessment of Public Policy Communications in Central Region of Vietnam. *Modern Economy*, 9(12), 2052-2063. <https://doi.org/10.4236/me.2018.912128>
- RI (2020). *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/>
- Sukoharjo (2020). *Sukoharjo Tanggap COVID-19*. <https://corona.sukoharjokab.go.id/>
- Valibeigi, M., Feshari, M., Zivari, F. & Motamedi, A., 2019, 'How to improve public participation in disaster risk management: A case study of Buein Zahra, a small city in Iran', *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies* 11(1), a741. <https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.741>
- WHO. (2020). *WHO announces COVID-19 outbreak a pandemi* . Retrieved April 2020, from World Health Organization Regional Office for Europe: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid19/news/news/2020/3/who-announces-COVID-19-ou>
- Yasir, Y., Et.All., (2019). Kebijakan komunikasi dalam membangun destinasi dan masyarakat sadar wisata di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(3). doi: 10.25139/jsk.3i3.1548
- Zhang, Y.L and Zhu, X.Y (2017) Multiple Mechanisms of Policy Diffusion in China. *Public Management Review*.